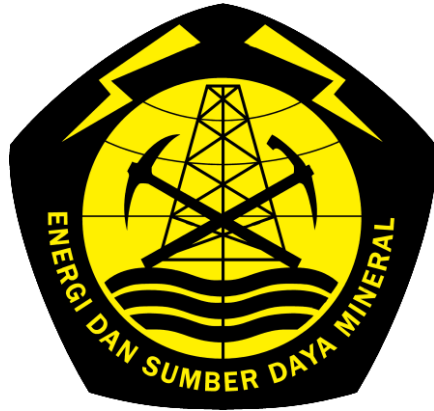




PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

**BESERTA TAMBAHAN INFORMASI HASIL EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (REVISI)**

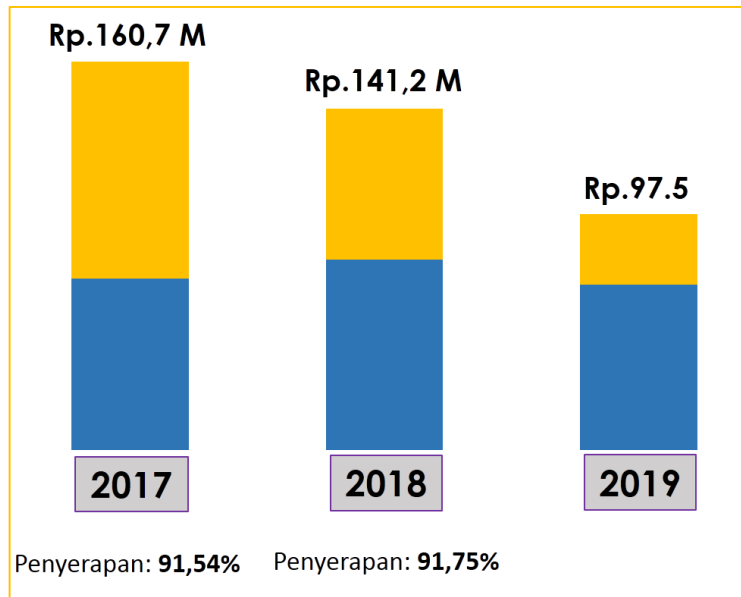
Jakarta, 21 Agustus 2019



CAPAIAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN (1)

ANGGARAN SEMAKIN EFEKTIF

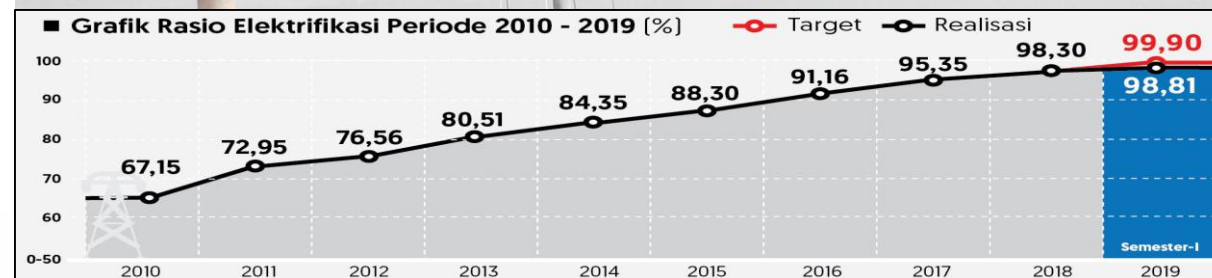
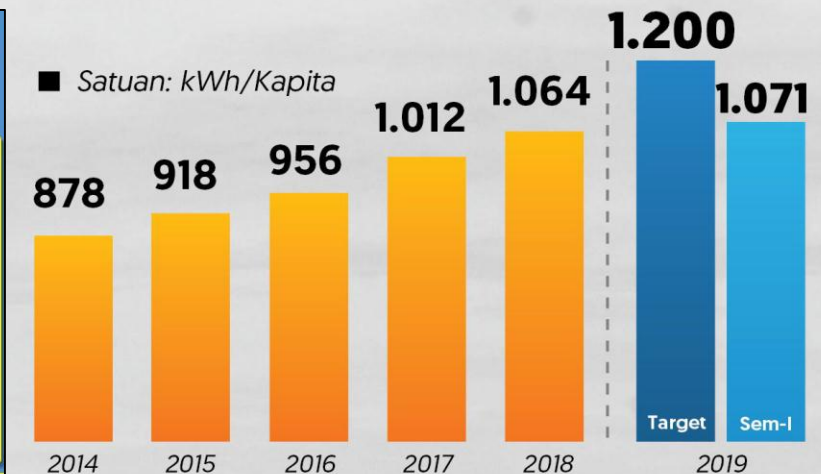
Lebih banyak komposisi untuk masyarakat



PRESTASI TERUS MENINGKAT

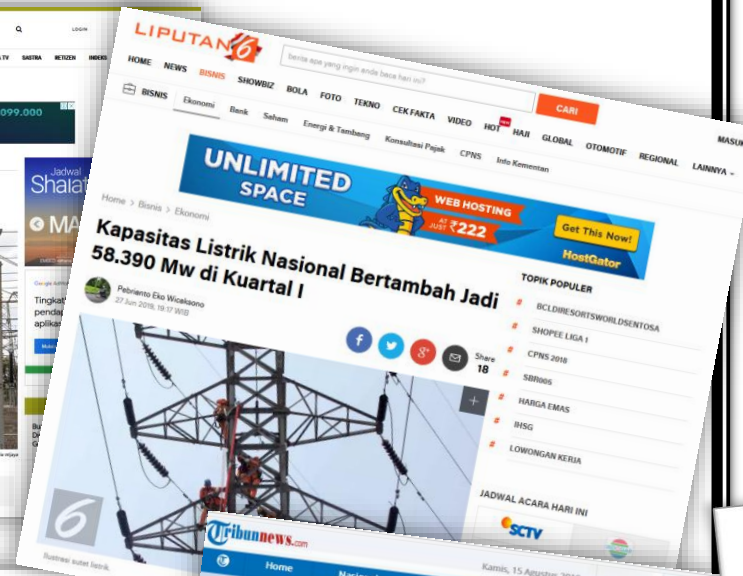
Konsumsi Listrik Nasional Meningkat

menuju tren konsumsi negara maju



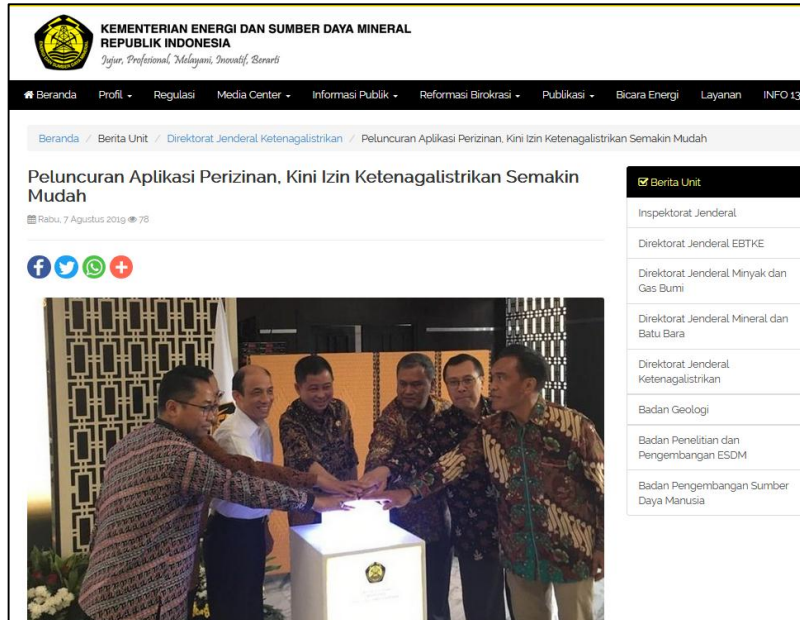
CAPAIAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN (2)

PRESTASI TERUS MENINGKAT

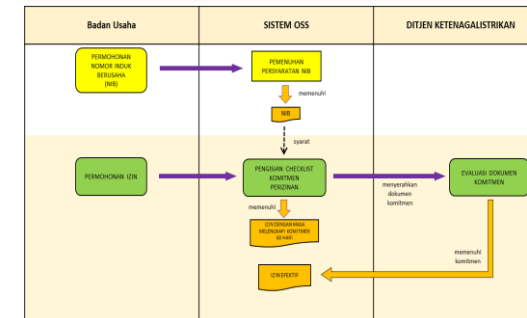


PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN SATU PINTU

PERIZINAN TERPADU



PROSES LEBIH MUDAH DAN CEPAT



KONSULTASI & LAYANAN INFORMASI MUDAH



<https://perizinan.esdm.go.id/>

Terintegrasi dengan
<https://www.oss.go.id>

MANFAAT INOVASI PELAYANAN SECARA ONLINE

Kondisi Sebelum Sistem Online

Permohonan izin/sertifikasi masih manual.
Stakeholder menyerahkan dokumen berkas *hardcopy*.



Database perizinan/sertifikasi susah ditelusuri.
Belum ada standarisasi penomoran.



Pemantauan/monitoring susah dilakukan.
Sulit mengambil tindakan / kebijakan apabila terjadi pelanggaran.



Permohonan izin/ penetapan/ registrasi membutuhkan waktu lama.
Pemohon harus mengantarkan berkas ke kantor Ditjen Gatrik.



Sulit melakukan pengecekan keabsahan.
Pelaku usaha harus menghubungi Ditjen Ketenagalistrikan untuk mengecek keabsahan sertifikat.



Kondisi Setelah Sistem Online

Permohonan penetapan / registrasi sertifikat langsung via *online*.
Dokumen pemenuhan persyaratan diupload (*paperless*).



Informasi dan database mudah ditelusuri.
Menggunakan standarisasi penomoran yang dibakukan



Pemantauan/monitoring mudah dilakukan.
Mudah mengambil tindakan / kebijakan apabila terjadi pelanggaran.



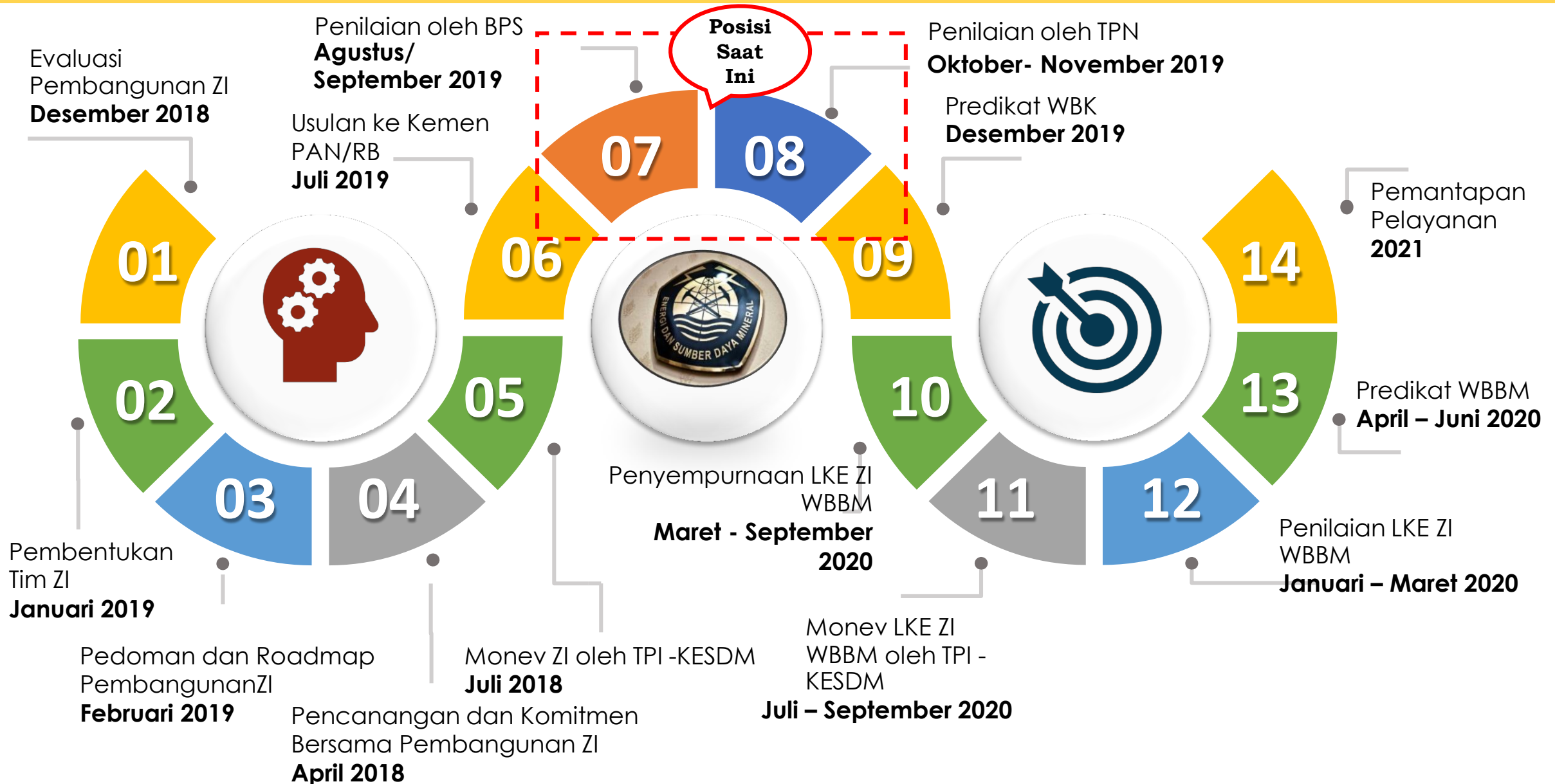
Waktu penetapan izin / registrasi sertifikat lebih cepat.
Permohonan yang masuk *real time* dapat diproses dan ditelusur. Mengurangi tatap muka dengan *stakeholder*.



Pengecekan keabsahan lebih mudah.
Pelaku usaha dapat mengecek keabsahan sertifikat secara *online*.



ROAD MAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



USULAN PENILAIAN WBK 2019: 90,18



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0973/08/3JN.0/2019 31 Mei 2019
Sifat : Diassa
Hal : Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Yang terhormat,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
di
Jakarta

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bab III tentang Syarat dan Mekanisme Penetapan Unit Kerja Berpredikat menuju WBK dan menuju WDDM, Kementerian ESDM mengusulkan 21 unit kerja WBK dan 4 unit kerja WBBM, dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Usulan	Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Migas	WBBM	58,70	37,29	95,99
2	Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	WBBM	59,09	36,64	95,73
3	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	WBBM	55,47	38,93	94,40
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Aparatur	WBBM	53,29	39,16	92,45
5	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Minerba	WBK	59,50	35,71	95,21
6	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEBTKE	WBK	58,19	36,81	95,00
7	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	WBK	54,69	40,00	94,69
8	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	WBK	56,18	38,09	94,27

No	Unit Kerja	Usulan	Pengungkit	Hasil	Jumlah
9	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	WBK	56,18	37,69	93,87
10	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	WBK	55,51	37,84	93,35
11	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	WBK	56,27	36,81	93,08
12	Puslitbang Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	WBK	56,97	35,80	92,77
13	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	WBK	55,74	36,80	92,54
14	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	WBK	55,66	36,59	92,25
15	Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	WBK	54,21	36,56	90,77
16	Direktorat Panas Bumi	WBK	53,94	36,61	90,55
17	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	WBK	53,94	36,24	90,18
18	Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	WBK	54,42	35,60	90,02
19	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	WBK	54,67	35,34	90,01
20	Puslitbang Teknologi KEBTKE	WBK	55,29	34,32	89,61
21	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	WBK	52,45	33,07	85,52
22	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	WBK	46,93	37,75	84,68
23	Politeknik Energi dan Mineral "Akamigas"	WBK	49,52	34,63	84,15
24	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	WBK	46,97	35,24	82,21
25	Pusat Data dan Teknologi Informasi	WBK	45,99	35,06	81,05

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



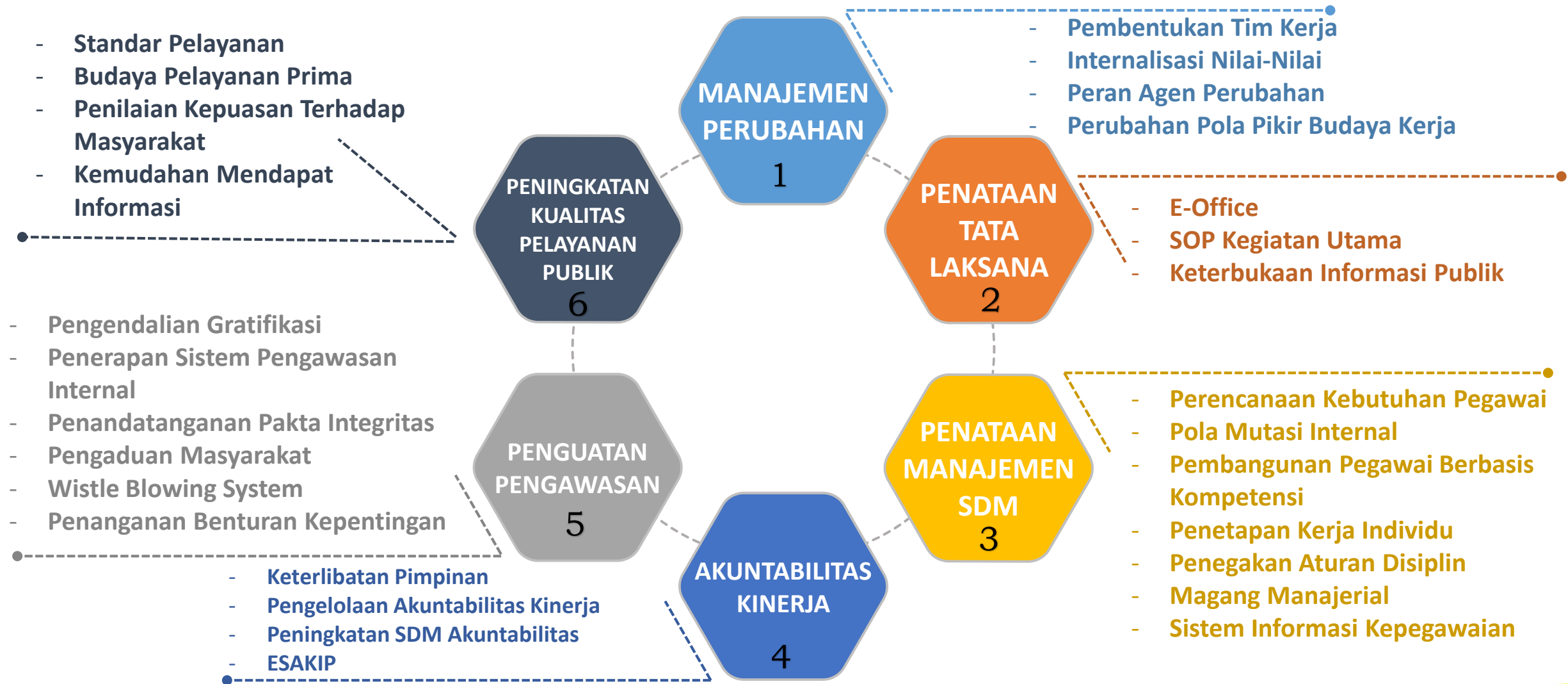
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Sekretaris Jenderal,

Ego Syahrial
NIP 196207011990031002

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



6 AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS



MANAJEMEN PERUBAHAN (1)

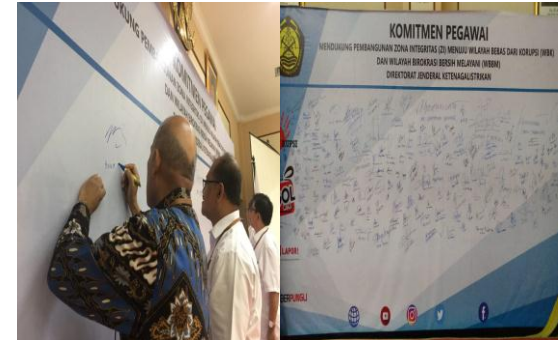
NILAI-NILAI KESDM
disosialisasikan dan dipahami



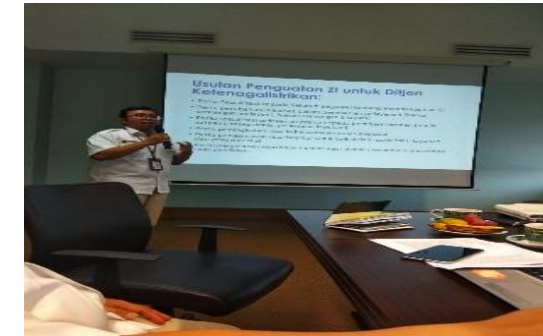
PIMPINAN MEMBERI TELADAN



KOMITMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
ditandatangani pimpinan dan pegawai



AGEN PERUBAHAN
sebagai penggerak, pemberi solusi, mediator, penghubung



KEBERSAMAAN
memudahkan sosialisasi



Internalisasi ZI
melalui media internal



SOSIALISASI KE STAKEHOLDER
melalui media luar ruang dan medsos



Tim Pembangunan ZI
dibentuk, dimonitor, dan dievaluasi



MANAJEMEN PERUBAHAN (2)

Perubahan-Perubahan Ditjen Ketenagalistrikan : Melibatkan Agen Perubahan

RAPAT RAMAH LINGKUNGAN

Pengurangan botol plastik



PENATAAN ARSIP

Ruang Kerja Lebih Rapi



PENUNJUK ARAH

Kini Semakin Jelas



LARANGAN MEROKOK

Disediakan Ruang Khusus Merokok



KANTIN SEMAKIN NYAMAN



SURVEY KEPUASAN LANGSUNG

Dipantau setiap bulan



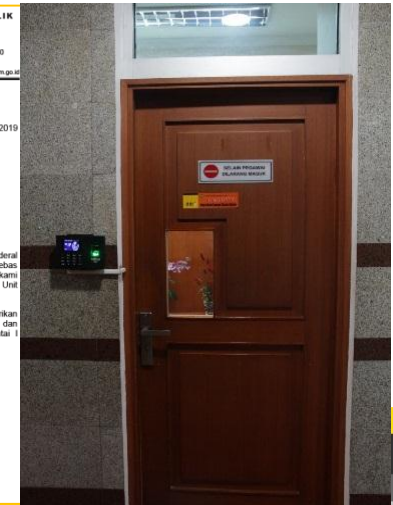
PELAYANAN RAMAH DIFABEL

Masukan Ombudsman 2017



OPTIMALISASI RUANG PELAYANAN PUBLIK

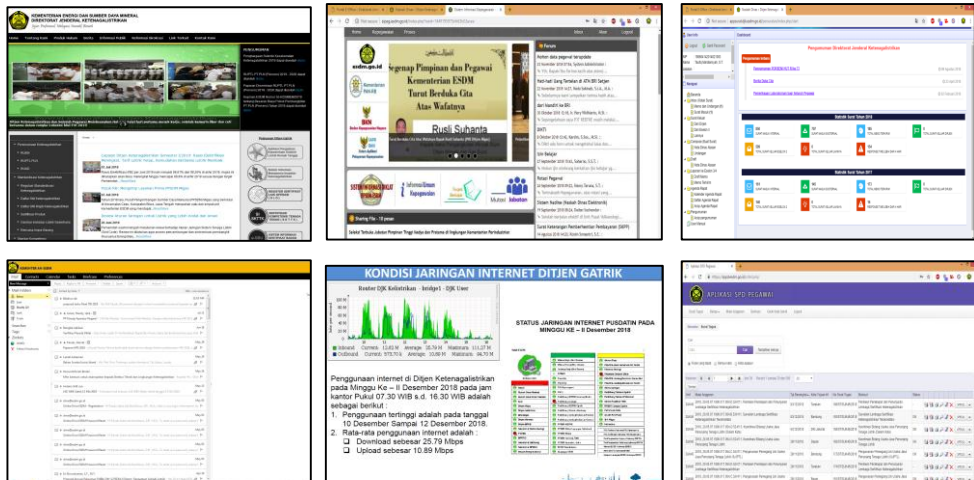
Tamu Dilarang Masuk Ruang Kerja



PENATAAN TATA LAKSANA

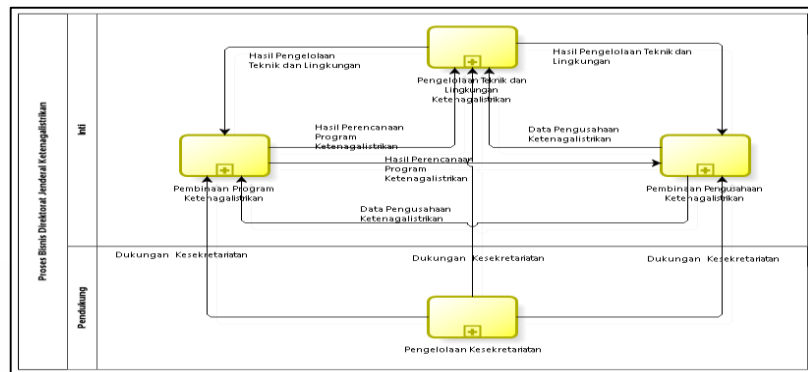
E-OFFICE/LAYANAN BERBASIS TI

Website, Sistem Kepegawaian, Persuratan, Email Resmi, Monitoring TI, Perjalanan Dinas



SOP MENGACU PROSES BISNIS

dipahami dan disosialisasikan



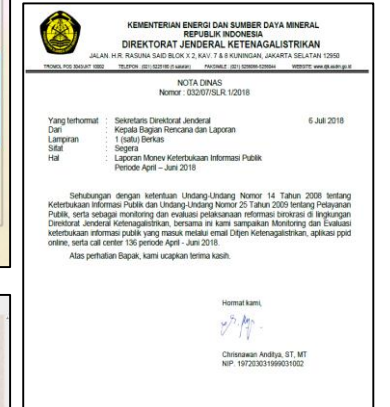
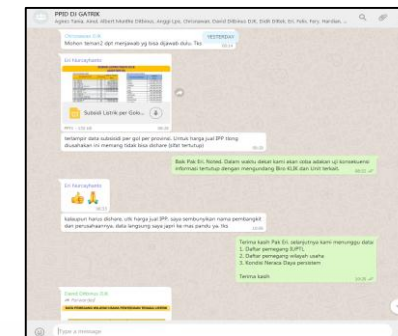
SOSIALISASI KE PUBLIK

melalui media sosial, coffee morning, FGD, dan konferensi pers berkala



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pembentukan tim, pelaksanaan, dan money Tim PPID; Cara mendapatkan informasi publik disosialisasikan secara jelas ke publik melalui TI.



PENATAAN MANAJEMEN SDM



PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Analisa kebutuhan pegawai, Anjab dan ABK mengacu aturan dan dilakukan monev



POLA MUTASI

Memperhatikan kompetensi jabatan, pola mutasi, dan *assessment* untuk pengisian jabatan



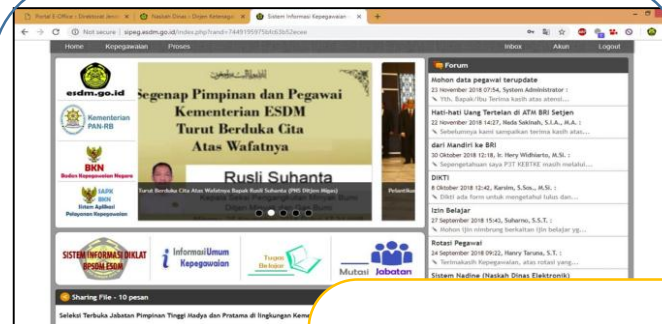
PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI

Magang Manajerial, Magang New Hire dan diklat



PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kontrak/PK Dirjen dan diturunkan sampai ke level staf; Pemberian Penghargaan



SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pemutakhiran SIPEG, portal pegawai, SAPK, DOKTAH secara *real time*



PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN

PP 53 tahun 2010 dan Permen ESDM No. 44 Tahun 2018 disosialisasikan internal



AKUNTABILITAS KINERJA

KETERLIBATAN PIMPINAN

Pada saat Rapat Kerja

PENENTUAN TARGET KINERJA

Terdokumentasi, terpublikasi, dan disahkan sebagai perjanjian kinerja pejabat terkait

PUBLIKASI RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA KE PUBLIK

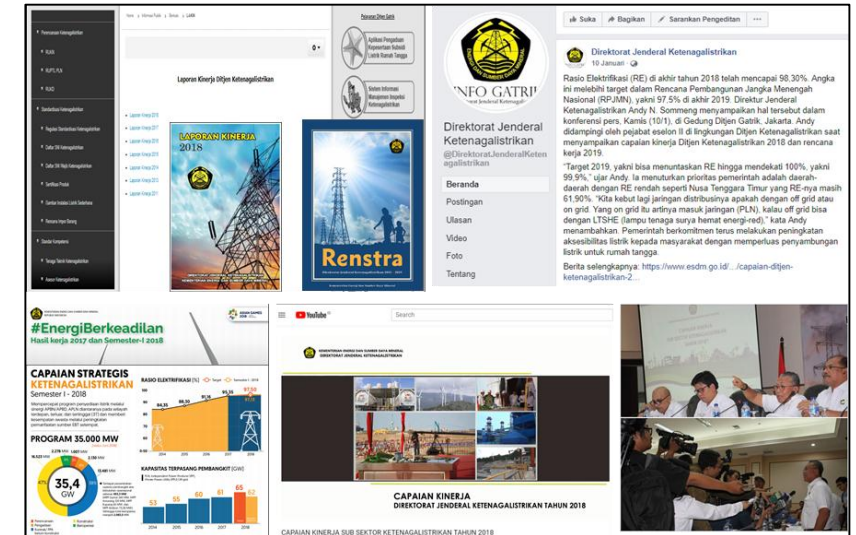
Melalui *Pers Conference*, Website, Social Media, Infografis, dan Publikasi Online

PENINGKATAN KAPASITAS SDM YANG MENANGANI AKUNTABILITAS KINERJA

oleh Narasumber dan peserta yang berkompeten

PELAPORAN DAN MONEV BERKALA BERBASIS ONLINE KE STAKEHOLDER

dilaporkan secara berkala sebagai wujud *monitoring* dan evaluasi yang terkoordinasi



EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Setelah diimplementasikannya ESAKIP, Laporan Kinerja menjadi lebih cepat selesai. Nilai SAKIP selalu meningkat menunjukkan kinerja yang semakin berkualitas.



Implementasi Perdana ESAKIP pada Februari 2019. **Final LAKIN tingkat Eselon 1 maksimal 27 Februari 2019**



PENGUATAN PENGAWASAN (1)

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Telah dilakukan sosialisasi melalui Banner, Website, dan Media Sosial. Terdapat kotak pengaduan dan pernyataan komitmen anti gratifikasi



PENERAPAN SPIP

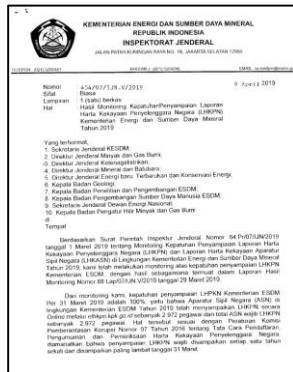
Membentuk Tim, Melaksanakan dan Monitoring Berkala. Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Laporan keuangan dilakukan tiap Semester

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 63X/73/DJL.1/2019
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



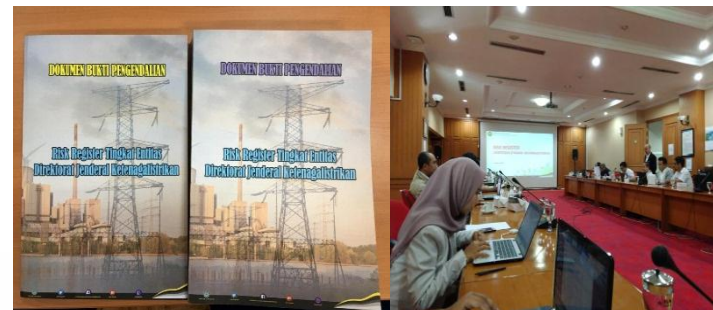
KEPATUHAN 100%

Penyampaian LP2P, SPT Tahunan, LHKPN, LHKASN



MITIGASI RISIKO

Penyusunan Risk Register Setiap Tahun Dan Dilakukan Monitoring Setiap Triwulan



PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

oleh seluruh pejabat



PENGUATAN PENGAWASAN (2)

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

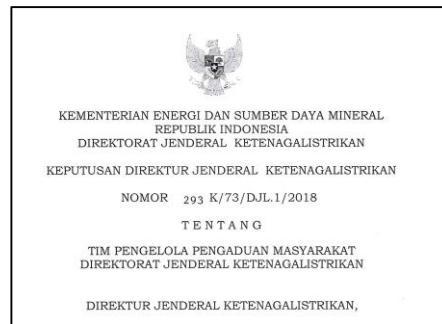
Penyediaan Kotak Pengaduan,
SOP Penanganan Pengaduan,
Monev Berkala Pengaduan,

WHISTLE BLOWING SYSTEM

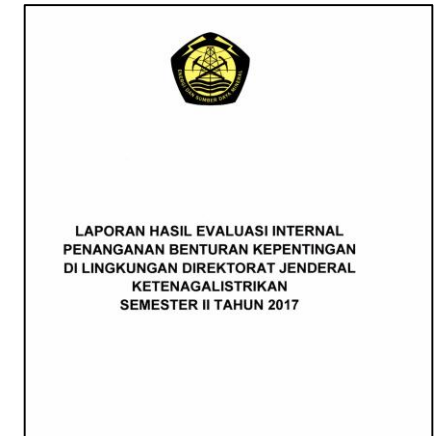
Mudah diakses, disosialisasikan
dan dilakukan monev secara berkala

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penyusunan matriks Identifikasi.
Tidak ada lagi kekerabatan antar pegawai di
Ditjen Ketenagalistrikan



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT



PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)

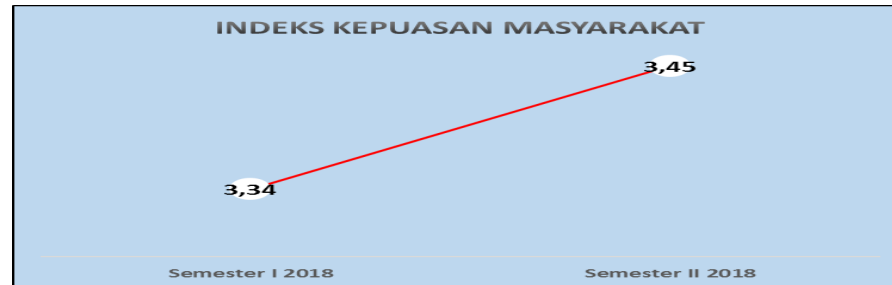
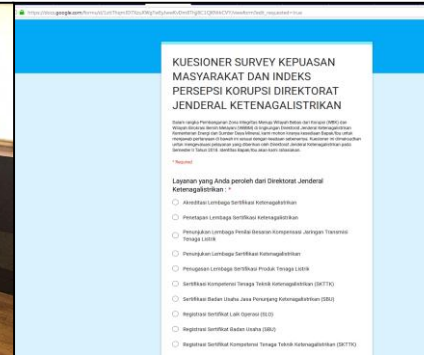
PELAYANAN PRIMA

Standard Pelayanan, Maklumat, dan Tata Cara Perizinan disosialisasikan dan dimonitor



PENILAIAN KEPUASAN MASYARAKAT

Survey berkala secara manual dan elektronik, Pemantauan Kepuasan Layanan



KEMUDAHAN MENDAPATKAN INFORMASI

Akses informasi di website, media sosial, dan turun langsung ke masyarakat



PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (2)

PEMBANGUNAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA

Memperbaiki Ruang pelayanan Publik, Penetapan dan Pemberlakuan standar layanan, serta pelatihan kepada petugas layanan



RENCANA PERLUASAN RUANG PELAYANAN PUBLIK

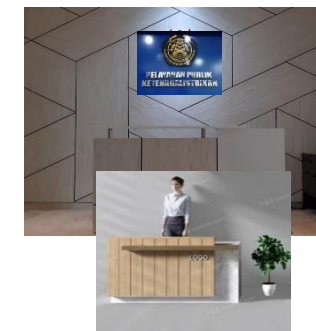
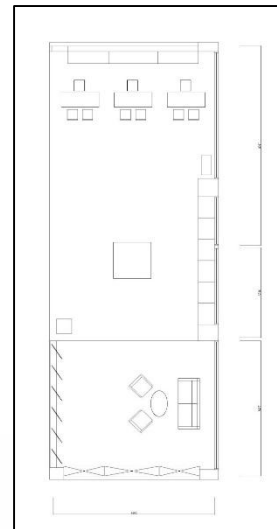
Menambah kenyamanan, memperbanyak ruang pertemuan dan fasilitas publik. Telah disusun desain ruangan dan dianggarkan di tahun 2020

KONDISI SAAT INI:



PERENCANAAN PERLUASAN

Menggabungkan ruang pelayanan, perpustakaan, lounge baca, ruang meeting, dan press room



BERBAGI KEPADA MASYARAKAT



"Yang dilakukan di NTT ini merupakan bentuk kepedulian dari Menteri ESDM Ignasius Jonan yang meminta kita para pegawainya untuk menyisihkan penghasilan untuk berbagi kepada saudara yang belum bisa menikmati listrik dengan pembiayaan sambungan listrik gratis"

- Dirjen Ketenagalistrikan, Rida Mulyana -



KOMITMEN PEMBANGUNAN ZI



“Predikat WBK dan WBBM bukan tujuan akhir, namun merupakan proses dan komitmen bersama untuk menjadikan Ditjen Ketenagalistrikan sebagai Zona Integritas,”

-Rida Mulyana-
Dirjen Ketenagalistrikan



TAMBAHAN INFORMASI EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN



MENGAPA DITJEN GATRIK MAJU SEBAGAI ESELON I

PROSES BISNIS SEDERHANA & TERINTEGRASI



SEMUA LAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SATU APLIKASI



RUANG PELAYANAN PUBLIK SATU PINTU



KOMITMEN PEMBANGUNAN ZI DILAKSANAKAN SATU UNIT ESELON I



KRONOLOGI KEJADIAN

Sistem Barat dan Sistem Timur terhubung melalui 2 sirkuit SUTET Mandirancan-Pemalang-Ungaran (Jalur Utara), dan 2 sirkuit SUTET Tasik-Kesugihan-Pedan (Jalur Selatan)



1. Kebutuhan listrik untuk wilayah Barat pasok oleh pembangkit yang berlokasi di wilayah Timur, dimana pada pukul 11.45.27 WIB, transfer daya listrik dari Timur ke Barat melalui SUTET 500 kV Jalur Utara dan Selatan adalah sebesar 2.335 MW.
2. Ketika terjadi gangguan SUTET 500 kV jalur Utara Ungaran – Pemalang yang belum diketahui penyebabnya, evakuasi daya listrik dari Timur ke Barat dipindahkan ke SUTET 500 kV jalur Selatan yang sedang dilakukan pemeliharaan satu sirkuit. Namun karena SUTET 500 kV Jalur Selatan tidak mampu menerima beban besar, maka terjadi kegagalan evakuasi daya listrik ke Barat.
3. Subsistem Jateng, Jabar, Jakarta dan Banten tidak mampu menanggung beban yang ada sehingga pemadaman listrik tidak dapat dihindari.

UPAYA YANG DILAKUKAN DITJEN GATRIK

Saat terjadi gangguan:

1. Menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan ke PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) untuk memantau pemulihan listrik oleh PLN.
2. Menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan ke tempat layanan umum untuk memantau proses pemulihan listrik, yaitu MRT.
3. Menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan ke lokasi indikasi terjadinya gangguan di Jawa Tengah untuk investigasi penyebab gangguan.
4. Semua pejabat Ditjen. Ketenagalistrikan memantau dan berkoordinasi dengan pejabat PLN untuk memastikan pemadaman listrik segera dipulihkan oleh PLN.

Pasca terjadi gangguan:

Menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan untuk terus melakukan investigasi penyebab terjadinya gangguan pasokan pada sistem kelistrikan Jawa Bali.

SARAN DAN MASUKAN KEPADA PT PLN (PERSERO) TERKAIT PEMADAMAN 4 AGUSTUS 2019

Jangka Pendek:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang operasi dan pemeliharaan.
2. Meminta PLN untuk melakukan studi stabilitas sistem Jawa Bali dan melakukan evaluasi kesiapan sistem menghadapi gangguan (*defense scheme*), pasok mandiri dengan suplai dari pembangkit pada sub sistem (operasi *islanding*) dan perbaikan koordinasi sistem proteksi sehingga apabila terjadi gangguan dapat dilokalisir dan tidak berdampak luas.
3. Meminta PLN melakukan *review* prosedur atau pedoman pemeliharaan peralatan proteksi (*relay, contactor, Circuit Breaker*) dan kontrol penghantar untuk menghindari terjadinya gangguan dan mitigasi apabila terjadi gangguan.
4. Meminta PLN untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap *Standard Operating Procedure (SOP)* pengoperasian sistem, *SOP defense scheme* dan *SOP* pemulihan gangguan sistem agar manajemen pengaturan sistem kelistrikan dapat berjalan dengan baik saat operasi dan saat mengalami gangguan.

Jangka Menengah:

1. Meminta PLN untuk melaksanakan hasil studi stabilitas sistem kelistrikan Jawa Bali.
2. Meminta PLN untuk melakukan *assessment* dan penggantian peralatan-peralatan sistem proteksi yang telah melampaui umur peralatan (*life time*) dengan mempertimbangkan periode daur hidup aset (*asset life cycle*).

Jangka Panjang:

1. Meminta PLN untuk meningkatkan kemampuan jaringan transmisi tenaga listrik sehingga tersedia banyak alternatif evakuasi daya dari Timur ke Barat.
2. Meminta PLN untuk memastikan agar masing-masing sub sistem memiliki pasokan tenaga listrik yang cukup, sehingga tidak selalu mengandalkan transfer daya dari Timur ke Barat.



BAGAIMANA MENGENDALIKAN PROGRAM 35.000 MW?

Latar Belakang 35.000 MW

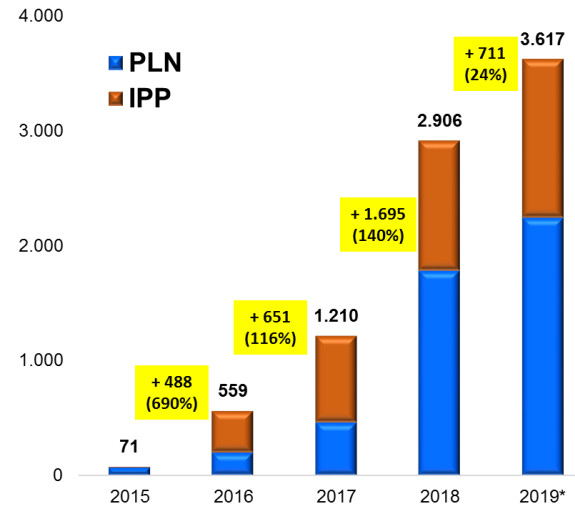
Pertumbuhan **ekonomi** $\pm 7\%$ /tahun membutuhkan tambahan kapasitas baru 7 GW/tahun atau **35 GW/5 tahun** (Kepmen ESDM No. 0074/2015 Tentang RUPTL 2015-2024)

Debottlenecking melalui peraturan

1. Permen No. 1/2015 tentang **kerjasama penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringan listrik** antar pemegang izin.
2. Permen No. 3/2015, tentang **Prosedur Pembelian Tenaga Listrik & Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik melalui Pemilihan Langsung & Penunjukan Langsung**.

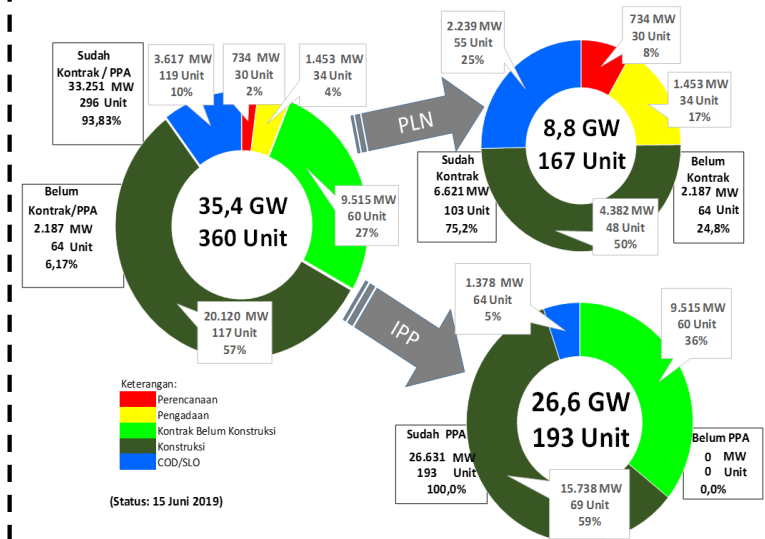
Capaian Program 35.000 MW s.d. Juni 2019

Proyek 35 GW Yang Telah Beroperasi 2015 – 2019
(dalam MW)



*Sampai dengan 15 Juni 2019

Kemajuan Proyek Pembangkit 35 GW
Berdasarkan Fase Pembangunan



- Sampai dengan **15 Juni 2019**, proyek pembangkit yang telah memasuki tahap operasi (**COD**) sekitar **3.617 MW (10%)**, tahap **konstruksi** sekitar **20.119 MW (57%)**, telah **kontrak/PPA** sekitar **9.515 MW (27%)**, proses **pengadaan** sekitar **1.453 MW (4%)**, tahap **perencanaan** sekitar **734 MW (2%)**;
- Penyelesaian pembangkit terkesan baru sedikit **3.617 MW (10%)**, namun apabila dilihat secara total, proyek yang **telah kontrak/PPA** mencapai sekitar **33.251 MW (93,83%)**, hanya tersisa **2.187 MW (6,17%)** yang **belum kontrak/PPA**. 10% proyek yang telah COD tersebut sebagian besar terdiri dari **PLTG/MG, PLTM** dan **EBT Skala kecil (PLTS, PLTBn, PLTBm, PLTBg)** karena memang masa konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif singkat (sekitar 12-24 bulan). Sedangkan **57%** proyek yang masih tahap konstruksi antara lain terdiri dari **PLTGU, PLTU, PLTP** dan **PLTA** dimana persiapan proyek dan proses konstruksi pembangkit jenis tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama;
- Sementara itu **27%** proyek pembangkit yang telah kontrak/PPA, saat ini dalam **proses pemenuhan persyaratan pendanaan** agar tercapai *financial closing/effective date* dimana untuk mencapainya harus menyelesaikan antara lain pembebasan lahan dan izin lingkungan (Amdal/UKL/UPL). Sedangkan sisa **6%** ditargetkan **tuntas** proses **pengadaannya** paling lama **tahun ini**;



AGEN PERUBAHAN: BAGAIMANA METODE PEMILIHAN, RENCANA TINDAK, DAN MONEY?

Proses Rekrutmen AP
dengan Assesment, Pembekalan, Diklat

Penyusunan Rencana Tindak
Agen Perubahan

Money Disampaikan Berkala

Assesment: Agustus- September 2016

Diklat Manajemen Perubahan:

5- 10 Desember 2016

Diklat Kepemimpinan Efektif

20 – 24 Februari 2017

NO.	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KETERANGAN
		SASARAN	IK	TARGET	KEGIATAN	WAKTU (BULAN)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jujur	Terwujudnya Dijen Ketenagalistrikan sebagai unit WBK WBDM	Nilai WBK dan Mengap RS	Nilai WBK minimal 75	- Koordinasi internal dengan tim RB - Membantu menyiapkan dokumen dan kelengkapan penilaian WBK WBDM - Membantu internalisasi seluruh aspek penilaian WBK WBDM - Evaluasi	05 06 07-08 09	
2	Profesional	Tercapainya penilaian survey kepuasan masyarakat atas pelayanan Dijen Ketenagalistrikan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai kepuasan masyarakat meningkat	- Koordinasi dengan semua pemilik layanan publik di DJK - Membantu penyebaran dan penghitungan survey pelayanan publik secara online - Membantu evaluasi dan pelaporan survey kepuasan pelayanan publik - Membantu tindak lanjut atas usulan stakeholder sesuai hasil survey	05 06 dan 12 07 dan 01 08 dan 02	
3	Inovatif	Terwujudnya kawasan khusus merokok sehingga tidak ada yang merokok di ruangan kerja	- Adanya aturan larangan merokok - Tertangggunya Kawasan Merokok	- Satu aturan - Satu kawasan merokok	- Koordinasi dengan SLUP menentukan aturan larangan merokok - Menyusun SK atau Peraturan Dijen tentang kawasan dilarang merokok - Melakukan sosialisasi kawasan dilarang merokok - Melakukan Evaluasi	06 07 08 – 11 12	
4	Melayani	Meningkatnya tamu pelayanan konsultasi/pemrosesan/verifikasi di ruang pelayanan publik dan berkurangnya tamu berkunjung ke ruang kerja	Jumlah penerimaan di ruang pelayanan bertambah	Jumlah tamu di ruang pelayanan meningkat 100%	- Koordinasi dengan unit pemberi layanan - Menyusun SOP penerimaan tamu pelayanan publik di Dijen Ketenagalistrikan - Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan - Melakukan evaluasi	06 07 08 – 11 12	
5	Berarti	Terseminasinya Reformasi Birokrasi untuk ASN dan karyawan Dijen Ketenagalistrikan	Tertaksananya sosialisasi melalui pertemuan resmi Tertaksananya sosialisasi melalui media sosial	Satu Kali pelaksanaan sosialisasi melalui pertemuan resmi Dua kali pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial	- Koordinasi dengan Tim RB untuk menyiapkan acara sosialisasi - Koordinasi dengan Humas Dijen Gatrik untuk sosialisasi melalui media sosial - Pelaksanaan Sosialisasi - Sosialisasi melalui media sosial - Pelaksanaan Evaluasi	07 08 09 dan 11 12	

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 180 K/73/DJL.1/2019
TENTANG
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Menimbang :

- bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, perlu perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan pembentukan agen perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 675, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
JALAN H.R. RASUNA SAID BLOK X-2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950
TROMOL POS 3043/UKT 10032 TELEPON (021) 8228180 (5 saluran) FAX/SMILE (021) 8256005-8256005 WEBSITE: www.dj-esdm.go.id

NOTA DINAS

Yang terhormat : Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi 21 Juni 2018
Dari : Agen Perubahan Dijen Ketenagalistrikan
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Rencana Tindak Agen Perubahan Semester I Tahun 2018

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7805 K/ 73/SJN/2016 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama ini kami sampaikan laporan rencana tindak agen perubahan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Semester I tahun 2018 sebagai berikut:

NO	Sasaran	Tindakan lanjut
1	Terwujudnya survey kepuasan pelayanan publik Dijen Ketenagalistrikan secara online	- Agen Perubahan telah mendiskusikan konsep dan rencana survey kepuasan pelayanan publik secara online kepada Tim RB Dijen Ketenagalistrikan, Tim IT Dijen Ketenagalistrikan, dan Unit Pemilik Layanan Publik. - Saat ini tengah disusun konsep survey secara online.
2	Terwujudnya Ruang Pelayanan Informasi Publik Dijen Ketenagalistrikan yang lebih nyaman, cepat, dan profesional	- Agen perubahan telah mendiskusikan konsep dan rencana ruang pelayanan informasi dengan unit terkait (Bagian Umum, Bagian Rencana dan Laporan, serta Unit pemilik layanan Publik). - Saat ini tengah diupayakan pengadaan kursi di meja pelayanan publik Dijen Ketenagalistrikan oleh Bagian Umum.
3	Integrasi medsos Dijen Ketenagalistrikan untuk pelayanan publik	- Agen perubahan telah mendiskusikan rencana integrasi medsos Dijen Gatrik dengan Tim Humas dan Tim IT Dijen Ketenagalistrikan. - Telah disosialisasikan materi reformasi birokrasi melalui website dan medsos Dijen Ketenagalistrikan (dokumentasi terlampir).



Pengawasan : Sejauh mana kita meyakini unit kita sudah tidak ada praktik KKN baik di layanan maupun di lapangan?

Wajib
LHKPN

<https://elhkp.kpk.go.id>

KPK

100%

telah diverifikasi oleh

Wajib
LHKASN

<https://siharka.menpan.go.id>

ITJEN KESDM,
KemenPAN
&RB

KEPATUHAN LHKPN DAN LHKASN 100%



SOSIALISASI GRATIFIKASI



BANNER GRATIFIKASI



TINGKAT MUTU
PELAYANAN
PT. PLN (PERSERO)



GALERI BROSUR
KETENAGALISTRIKAN



FAKTOR EMISI
GAS RUMAH KACA
SISTEM INTERKONEKSI
KETENAGALISTRIKAN



KONSEP
STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK
KETENAGALISTRIKAN



25 Juli 2019
Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali meresmikan proyek program percepatan pem-
infrastruktur keenagalistrikan 35.000 MW. Kamis (25/7) ini, proyek ketenagalistrikan ya
diresmikan adalah...[Read More](#)



Capaian Ditjen Ketenagalistrikan Semester I/2019: Rasio Elekt
Meningkat, Tarif Listrik Tetap, Kemudahan Berbisnis Listrik Mer



03 Juli 2019
Rasio Elektrifikasi (RE) per Juni 2019 naik menjadi 98,81% dari 98,30% di akhir 2018
diharapkan akan terus meningkat hingga mencapai 99,9% di akhir 2019 sesuai denga
Pemerintah....[Read More](#)



LAYANAN PENGAJARAN
SECARA ELEKTRONIK
(LPSE)



PENGADUAN
MASYARAKAT
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)



E - MAIL DIJEN
KETENAGALISTRIKAN



PELAPORAN
GRATIFIKASI ONLINE

GOL DALAM WEB GATRIK

APLIKASI INTERNAL (LOKAL CONTENT) – TERMASUK DIGITALISASI ARSIP ?

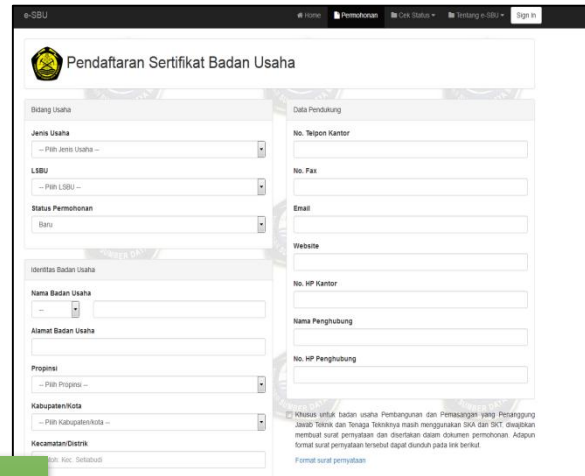
Registrasi Sertifikat Laik Operasi

Slodjk.esdm.go.id



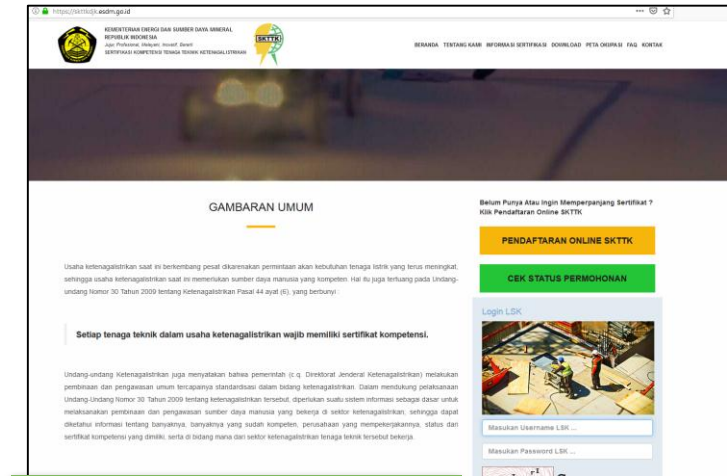
Registrasi Sertifikat Badan Usaha Ketenagalistrikan

Sbu.djk.esdm.go.id

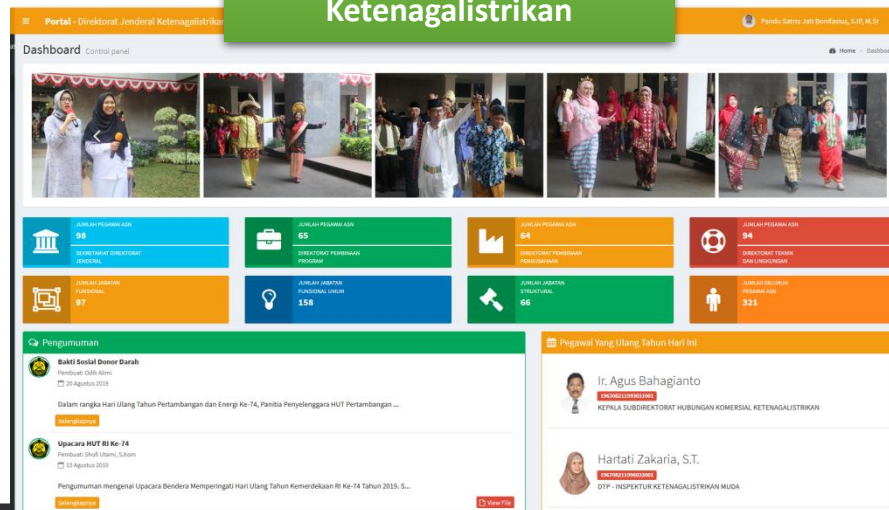


Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

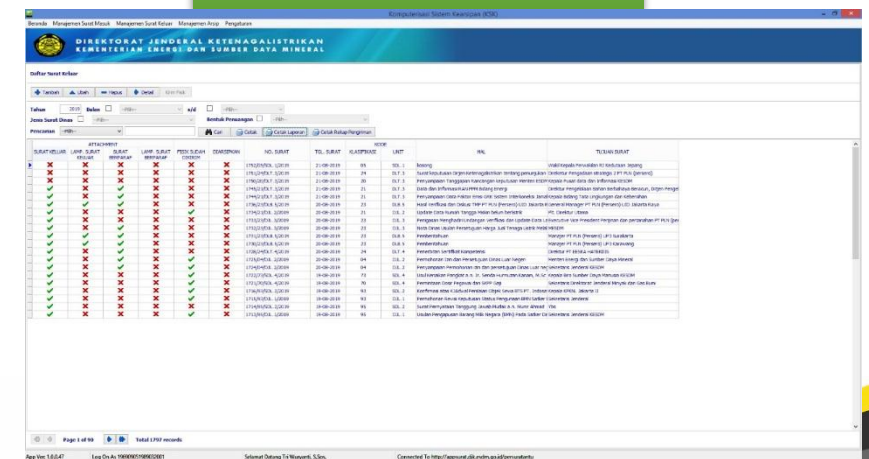
skttkdjk.esdm.go.id



Aplikasi Layanan Perkantoran Ditjen Ketenagalistrikan

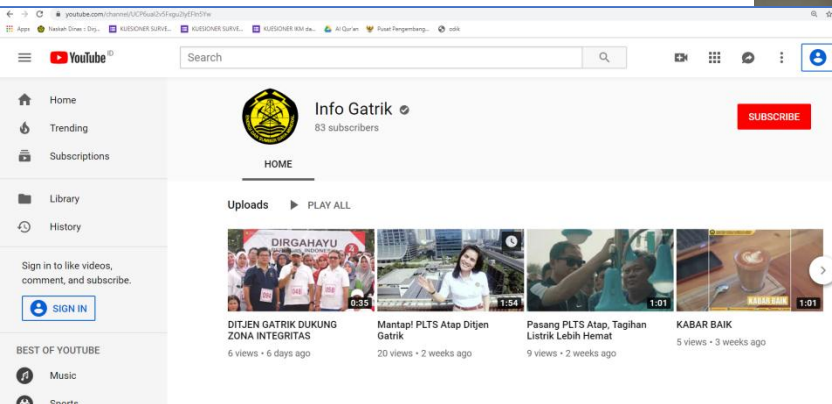


Arsip Surat Masuk – Keluar Secara Digital



UPAYA SEMAKIN MENDEKATKAN DIRI DENGAN STAKEHOLDER?

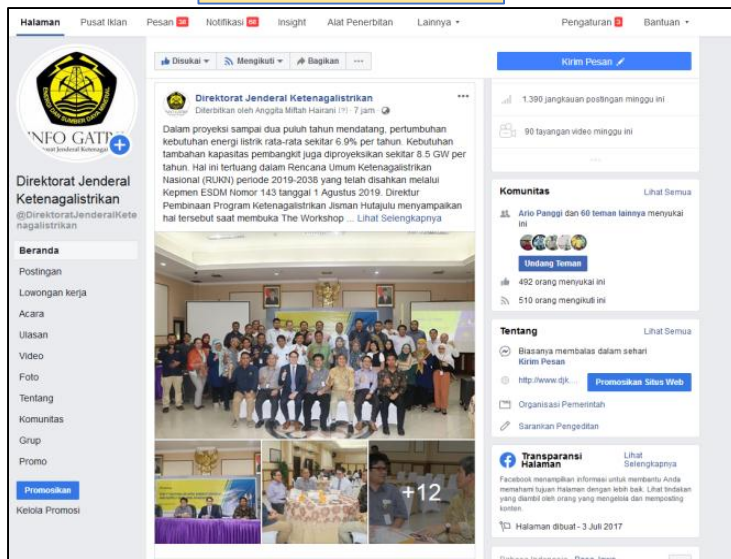
Youtube Info Gatrik



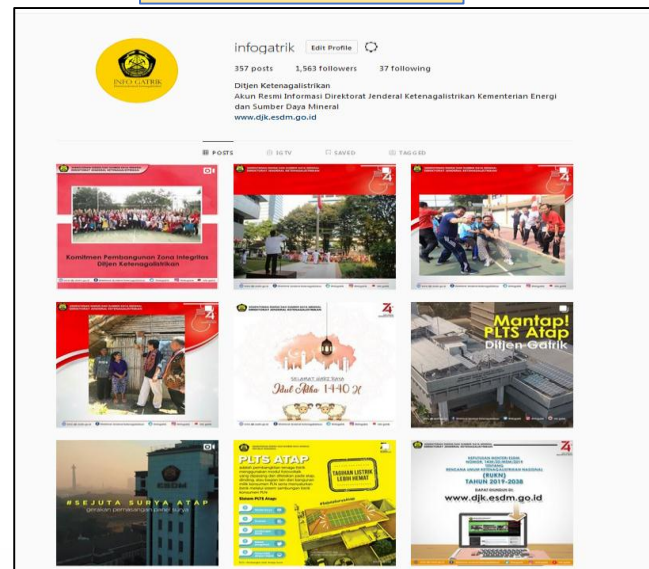
Youtube live streaming coffee morning



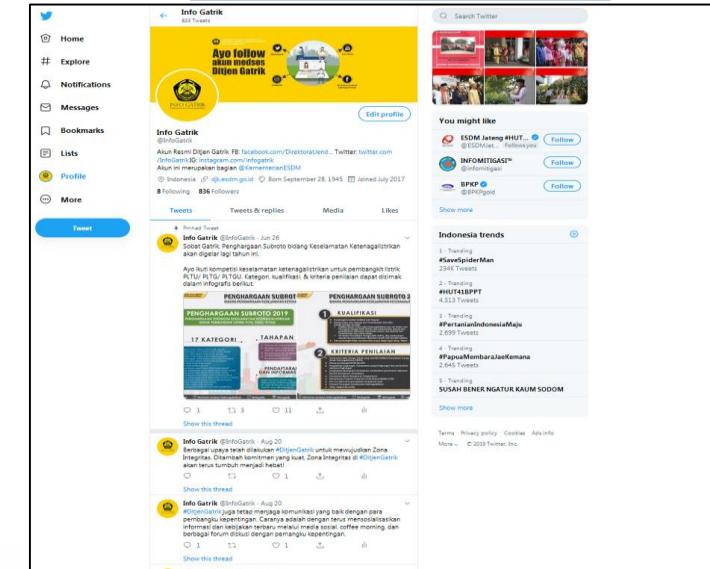
FB Info Gatrik



IG @infogatrik



Twitter @infogatrik



BAGAIMANA SOP DAN PELAKSANAAN REWARD DAN PUNISHMENT PEGAWAI?


**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 69 K/73/DJL.1/2019
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA SETINGKAT LEBIH TINGGI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIANGKAT SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNS) KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan dalam rangka pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagalistrikan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, perlu mengatur pemberian tunjangan kinerja setingkat lebih tinggi dari kelas jabatannya bagi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Setingkat Lebih Tinggi (PNS) yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran



V S

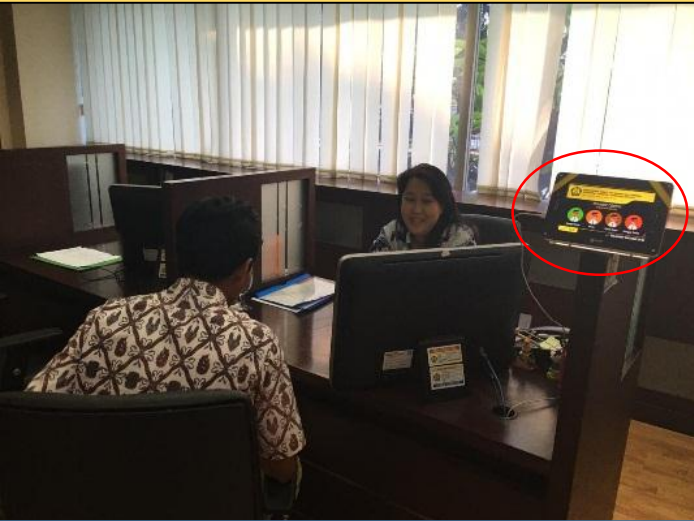
REWARD
Pemberian Penghargaan kepada **Pegawai Teladan** Pemberian Tunjangan Kinerja setingkat lebih tinggi bagi **PPNS**



PUNISHMENT
Penegakan aturan disiplin PP 53 tahun 2010 dan kode etik disosialisasikan dan **diterapkan**



PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT?



https://docs.google.com/forms/d/1ztiThgmJ0DzoufWgUwfyjwauQm8ThgC1Q7NocVY/viewform?edit_requested=true

KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Dalam rangka Peningkatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBKD) dan Wilayah Bersih dan Berdaya Saing (WBDBS) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kami mohon bantuan Anda untuk mengisi dan menyerahkan pengisian di bawah ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kuasalah informasi untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Semester II Tahun 2018. Identitas Bapak/Ibu akan kami rahasiakan.

* Request:

Layanan yang Anda peroleh dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan :

- ☐ Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
- ☐ Penetapan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
- ☐ Pemugasan Lembaga Persepsi Besaran Kompetensi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- ☐ Pemugasan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
- ☐ Pemugasan Lembaga Sertifikasi Produk Tenaga Listrik
- ☐ Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTK)
- ☐ Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pemangung Ketenagalistrikan (SBU)
- ☐ Registrasi Sertifikat Laki Operasi (SLO)
- ☐ Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)
- ☐ Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTK)



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN SEMESTER II TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
2019



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN SEMESTER I TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
2019

- SURVEY DILAKUKAN MELALUI GOOGLE FORM DAN SECARA LANGSUNG KE PENERIMA LAYANAN (SCREEN)
- MASUKAN DALAM SURVEY DITINDAKLANJUTI UNTUK PERBAIKAN

INDEKS PERSEPSI KORUPSI



Semester I 2018

Semester II 2018

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



Semester I 2018

Semester II 2018





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
(GATRIK)

TERIMA KASIH
